

## **Peran APEC dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kawasan Asia-Pasifik melalui Implementasi *Blue Economy***

Ni Made Cantya Fuza Adela<sup>1</sup>, Aditya Sukma Bimantoro<sup>2</sup>, Natasya Shalika Putri<sup>3</sup>, Deasy Silvyia Sari<sup>4</sup>, R. Dudy Heryadi<sup>5</sup>

1. [made21003@mail.unpad.ac.id](mailto:made21003@mail.unpad.ac.id)

2. [aditya21003@mail.unpad.ac.id](mailto:aditya21003@mail.unpad.ac.id)

3. [natasya21001@mail.unpad.ac.id](mailto:natasya21001@mail.unpad.ac.id)

4. [deasy.silvyia@unpad.ac.id](mailto:deasy.silvyia@unpad.ac.id)

5. [dudy.heryadi@unpad.ac.id](mailto:dudy.heryadi@unpad.ac.id)

### **Abstract**

*The Asia-Pacific region has now become the axis of the world economy which is oriented towards its maritime potentials. But ironically, most of the coastal communities in the Asia-Pacific region actually live in poverty. One of the main causes of this is incorrect management of marine resources. In order to overcome these problems, the blue economy as a new approach is aimed to create a more inclusive and sustainable maritime economy. The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) as a regional cooperation forum in Asia-Pacific has an important role in ensuring the implementation of the blue economy in the region. This research will examine how the blue economy affects coastal communities in the Asia-Pacific region and how APEC's role in encouraging the implementation of the blue economy in Asia-Pacific. The method used in this study is a qualitative research approach. Qualitative approach is used to see multiple perspectives, the results which are constructed in a holistic view. Based on the research results, it was found that APEC has a concrete role in realizing the blue economy model in the Asia-Pacific region. The application of the blue economy strategy is also considered to have a significant effect on improving the economy and quality of life for coastal communities in the Asia-Pacific region.*

**Keywords:** *APEC, Asia-Pacific, Blue Economy, Goal 14 SDGs, Coastal Community.*

### **Abstrak**

Kawasan Asia-Pasifik kini telah menjadi poros perekonomian dunia yang berorientasi pada potensi maritim. Namun ironisnya, sebagian besar masyarakat pesisir di wilayah Asia-Pasifik justru hidup dalam kubangan kemiskinan. Pengelolaan sumber daya laut yang salah menjadi salah satu faktor penyebab utama. Guna mengatasi permasalahan tersebut, *blue economy* disinyalir menjadi pendekatan baru yang bertujuan untuk menciptakan perekonomian maritim yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai

forum kerja sama regional di Asia-Pasifik memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan *blue economy* di kawasan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaruh *blue economy* terhadap masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik serta bagaimana peran APEC dalam mendorong pengimplementasian *blue economy* di Asia-Pasifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk melihat realitas ganda (majemuk), hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa APEC memiliki peran konkret dalam mewujudkan model *blue economy* di kawasan Asia-Pasifik. Penerapan *blue economy* juga ditinjau berpengaruh signifikan terhadap perbaikan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat pesisir Asia-Pasifik.

**Kata Kunci:** APEC, Asia-Pacific, Blue Economy, Goal 14 SDGs, Coastal Community.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari faktor wilayahnya yang strategis. Asia Pasifik kini menjadi poros perekonomian dunia yang berorientasikan potensi maritim. Oleh karena itu, kawasan pesisir menjadi tonggak wilayah pemanfaatan potensi sumber daya laut Asia-Pasifik yang besar. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Asia-Pasifik sebagian besar menggantungkan kehidupannya terhadap kegiatan kelautan. Kendati demikian, seluruh kekayaan bahari di Asia-Pasifik justru tidak mampu menunjang kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Masyarakat wilayah pesisir justru berada dalam kubangan kemiskinan. Berdasarkan laporan program pembangunan *United Nations Development Programme* (UNDP) bersama ASEAN dan China, tercatat bahwa 36 juta orang di Asia hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 76%

merupakan masyarakat pesisir dan pekerja industri perikanan (Maas, 2022). Laporan UNDP lainnya mengatakan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di beberapa negara atau kepulauan di Asia-Pasifik menyentuh angka yang cukup tinggi, contohnya adalah Negara Vanuatu dengan tingkat kemiskinan mencapai 40% dan negara Fiji dengan tingkat kemiskinan sebesar 33%. Bahkan pada negara-negara besar di Asia-Pasifik seperti China, Indonesia, Cambodia, Filipina, dan sebagainya juga mengalami permasalahan yang sama (Ananta, Bauer, dan Thant, 2013). Pada tahun 2017 di Indonesia terhitung terdapat 2,7 juta nelayan yang termasuk dalam 25% penduduk miskin Indonesia (Nurfauzi dan Mansur, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang memprakarsai permasalahan tersebut, baik dari yang bersifat alami maupun manusiawi, antara lain seperti para nelayan yang tidak memiliki modal cukup; kekurangan akses atau kepemilikan teknologi dan pasar; fluktuasi musim penangkapan ikan; perdagangan ikan yang eksploitatif; rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam; serta dampak negatif dari segala modernisasi

yang terjadi sehingga mendorong *overfishing* dan *illegal fishing* yang dapat merusak lingkungan laut (Silooy, 2017). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masalah kemiskinan dan lingkungan ini saling berhubungan dimana terlihat dalam interaksi masyarakat pesisir dengan ekosistem pesisir dan laut.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, konsep *blue economy* disinyalir menjadi salah satu jalan keluar terbaik guna mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir pada beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Konsep yang digagas oleh Prof. Gunter Pauli ini menekankan kegiatan perekonomian yang disesuaikan dengan kemampuan dan daya dukung alam, di mana bahan baku dan proses produksi mengikuti cara alam bekerja. Lebih lanjut, konsep ini mendukung adanya pemberdayaan sumber daya masyarakat lokal, yang dalam hal ini akan menunjang laju perekonomian masyarakat pesisir. Konsep *blue economy* diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal namun dengan tetap menjaga kondisi langit dan laut biru “Blue Sky-Blue Ocean” (Pauli, 2013). Dalam mewujudkan model *blue economy* di Asia-Pasifik, tentunya peran pemerintah serta organisasi regional diperlukan guna merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola sumber daya laut kawasan Asia-Pasifik. APEC atau The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan salah satu forum kerjasama ekonomi negara-negara kawasan Asia-Pasifik yang mendorong pengimplementasian konsep *blue economy* di Asia-Pasifik. APEC telah menyepakati model *blue economy* sebagai fokus utama kerjasama kemitraan meliputi pembuatan inovasi sektor perairan, penciptaan energi, dan olah

Vol. 7. No. 1 (2024)

pasokan pangan. Kerjasama tersebut termaktub dalam deklarasi Xiamen yang disahkan pada The 4th APEC Ocean Related Ministerial Meeting/HOMM4 atau pertemuan tingkat tinggi menteri kelautan APEC yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014 di Xiamen, Tiongkok. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran APEC dalam mengatasi kemiskinan pesisir di kawasan Asia-Pasifik dengan kerangka konsep *blue economy*.

Dalam penelitian ini kami mempertimbangkan beberapa negara maritim yang terletak di kawasan Asia-Pasifik untuk dianalisis. Negara-negara tersebut meliputi Vietnam, Malaysia, Kamboja, India, dan lain sebagainya. Negara-negara tersebut dipilih karena memiliki potensi ekonomi sektor maritim yang besar namun memiliki tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang cukup tinggi. Analisis akan dibagi kedalam tiga set perkiraan. Pertama, peneliti mencoba untuk memeriksa mekanisme *blue economy* meliputi faktor-faktor apa saja yang menentukan terlaksananya *blue economy* di suatu negara. Kedua bagaimana peran APEC dalam mendorong terwujudnya *blue economy* terhadap kelima negara tersebut. Ketiga bagaimana perekonomian kelima negara tersebut tumbuh pasca pengimplementasian *blue economy*, peneliti akan membandingkan data pada tahun 2010-2016 yang didasarkan atas ketersediaan data tahunan. Kami akan menggunakan laporan komprehensif yang diterbitkan oleh IUCN dalam mengukur ekonomi biru di negara-negara Asia-Pasifik. Dalam laporan tersebut, tertuang data-data mengenai kegiatan tangkap ikan laut lepas, pariwisata pantai, budidaya laut, dan aktivitas pemberian hak laut dalam

total GDP tahun 2008 di negara-negara Asia-Pasifik

Sebelumnya telah banyak penelitian yang meneliti mengenai penerapan *blue economy* di Asia Pasifik, baik itu menelaah peran APEC atau untuk melihat dampak dari *blue economy* terhadap pengentasan kemiskinan. Salah satunya dapat dilihat dari artikel berjudul “Dampak Blue Economy Terhadap Ekosistem Di Asia Pasifik” yang ditulis oleh Muhammad Andhika Pradana pada tahun 2021. Berkenaan dengan konteks pada artikel tersebut, penulis menjelaskan mengenai penerapan *blue economy* di Asia-Pasifik dan dampaknya terhadap ekosistem masyarakat. Namun, penulis mengkaji wilayah Asia-Pasifik secara luas sedangkan penelitian saat ini akan berfokus untuk melihat dampak *blue economy* terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di negara Asia-Pasifik.

Peneliti juga menemukan penelitian lain yang dapat membantu meningkatkan referensi topik tulisan ini, seperti (Pradana, 2021); (Nurfauzi dan Mansur, 2022); (Chen, Bruyne, dan Bollempalli, 2020); (Silooy, 2017); (Mcilgorm, 2016); dan (Barkenbus, 2001). (Pradana, 2021) menemukan bahwa dengan menerapkan strategi *blue economy* dapat berdampak baik terhadap ekosistem di Asia-Pasifik, seperti adanya perkembangan keberlangsungan hidup manusia dan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Pasifik. (Nurfauzi dan Mansur, 2022) membahas mengenai implementasi konsep *blue economy* di Indonesia dalam sektor ekonomi kelautannya dalam harapan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pesisir pasca pandemi. (Chen, Bruyne, dan Bollempalli, 2020) menghasilkan penelitian yang menemukan beberapa cara untuk melakukan langkah-langkah proaktif

seperti, (1) mempertahankan perlindungan ekologi dan keanekaragaman hayati dengan menerapkan praktik manajemen yang baik; (2) memperbaiki kondisi lingkungan dari habitat yang terancam dan sumber daya pesisir dan keanekaragaman hayati laut; (3) mempromosikan ekowisata dan mengembangkan peluang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal; (4) meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas teknis masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan; dan (5) mendorong kolaborasi dan kemitraan aktif dengan pemangku kepentingan terkait dan mitra pendukung untuk manajemen kegiatan proyek yang efektif dari para komunitas pada penerapan *blue economy* untuk mengatasi hubungan kemiskinan dan lingkungan. (Silooy, 2017) meneliti mengenai implementasi konsep *blue economy* di Indonesia dalam sektor ekonomi kelautannya dalam harapan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pesisir pasca pandemi Covid-19. (Mcilgorm, 2016) membuktikan bahwa neraca nasional perlu melakukan evaluasi terhadap *blue economy*, jika tidak cukup dalam aspek-aspek lain. Mereka memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dalam pengukuran *blue economy*. Sementara, (Barkenbus, 2001) menjelaskan bahwa APEC telah memilih untuk tidak mengambil tindakan agresi terhadap krisis lingkungan. Namun apabila APEC tetap berkomitmen untuk berbicara sebagai lawan dari tindakan kolektif, masih banyak yang bisa dibicarakan dalam diskusi yang menggabungkan pandangan sektor sipil. Maka dengan itu belum ada penelitian yang menggabungkan konsep-konsep tersebut yaitu peran APEC dalam mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir

di kawasan Asia-Pasifik dengan menggunakan konsep *blue economy*. Setelah menemukan *research gap* serta mendapatkan referensi pendukung dari kombinasi penelitian lainnya membuat penelitian ini menarik untuk diteliti.

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara APEC mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik dengan kerangka konsep *blue economy*?

### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang peran APEC dalam mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik melalui penerapan konsep *blue economy*.
2. Menjelaskan cara APEC mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik dengan kerangka konsep *blue economy*.

### 3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep *blue economy* dalam Studi Hubungan Internasional mengenai peran APEC dalam mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik.

#### 2. Manfaat Praktis

#### Vol. 7. No. 1 (2024)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi akademisi dan pemangku kebijakan ekonomi dan sosial di kawasan Asia-Pasifik mengenai peran APEC dalam menangani kemiskinan masyarakat pesisir melalui implementasi konsep *blue economy*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kerjasama Regional

Kerjasama regional pada dasarnya tidak terlepas dari istilah regionalisme yang berasal dari kata 'region' dan 'isme'. Dalam tatanan internasional, region dianggap sebagai unit terkecil dari suatu negara. Sedangkan regional sendiri merupakan kumpulan dari dua negara atau lebih yang saling berdekatan secara geografis dalam suatu wilayah tertentu. Namun, menurut Hettne dan Soderbaum, selain kedekatan geografis, terdapat pula faktor lain yang menjadi penentu penyatuan negara-negara dalam satu kawasan, yakni faktor kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah (P.67, Hettne & Soderbaum, 2008). Dengan demikian, secara luas regionalisme dapat dipahami sebagai pengelompokan regional dari suatu masyarakat atau negara berdasarkan ide-ide, geografis, budaya, dan sifat saling ketergantungan. Terdapat 2 jenis regionalisme yang diperkenalkan oleh (Helen V. Milner dan Edward D. Mansfield, 1999). Pertama, regionalism berdasarkan kedekatan geografis. Yakni kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara karena adanya kedekatan geografis. Kedua, regionalisme non-government dan non-geografis. Kerjasama berbagai bidang yang dilakukan antar negara dengan letak geografis tidak berdekatan.

Kerjasama regional dapat

dibedakan berdasarkan beberapa bentuk berikut :

- a. Kerjasama Fungsional : kerjasama ini biasanya ditujukan untuk menyelesaikan isu-isu tertentu yang telah disetujui oleh negara-negara anggota.
- b. Kerjasama Ekonomi : Kerjasama untuk menciptakan sistem komersial atas tindakan bersama tanpa memerlukan penyesuaian di tingkat domestik untuk urusan internasional. Contoh: penghapusan hambatan dagang.
- c. Kerjasama Politik : kerjasama yang berkenaan dengan persoalan politik suatu kawasan, meliputi dukungan dan komitmen bersama antar negara anggota untuk saling menerapkan nilai dan praktik tertentu di suatu kawasan.
- d. Kerjasama isu luar negeri : kerjasama yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan luar negeri, biasanya berkaitan dengan keamanan. Pemerintah antar negara secara sistematis akan berunding untuk menetapkan posisi dan melaksanakan kebijakan bersama dalam organisasi internasional.

#### **A. Mekanisme Kerjasama Regional**

Menurut Hettne (1997) cara kerja pada tingkat regional dibagi menjadi lima tahapan. Tahapan-tahapan ini berfungsi sebagai sebuah alat ukur akan suatu regional diukur oleh tingkat kerjasama antar negara di kawasan tersebut. Tahapan-tahapan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Unit Geografis Sederhana  
Belum ada bentuk kerjasama dan interaksi rutin antar negara di dalam satu kawasan. Tetapi kerjasama dapat terjadi ketika ada ancaman,

kerjasama itupun akan berakhir ketika ancaman tersebut berakhir.

- b. Kumpulan Interaksi Sosial  
Suatu kawasan sudah mulai terdapat interaksi antar negara tetapi hanya diatur oleh norma-norma atau institusi informal.
- c. Kumpulan Organisasi Pertahanan  
Negara sudah mulai bekerja sama dan bersekutu dengan negara lain dalam suatu kawasan yang didasari oleh pemikiran dan tujuan yang sama untuk melawan sebuah ancaman secara bersama. Sehingga mulai terbentuknya kombinasi kekuatan dalam sebuah kawasan. Selain itu, sudah adanya perjanjian formal yang bersifat mengikat dan mengatur negara-negara dalam satu kawasan.
- d. Komunitas Keamanan  
Interaksi mulai berkembang sehingga bersifat informal yang melibatkan masyarakat di antara negara-negara dalam kawasan tersebut.
- e. *Region State*  
Mulai adanya pembeda dengan kawasan lain, dalam bentuk identitas bersama, kapabilitas bersama, dan legitimasi sebagai sebuah kesatuan dalam kawasan tersebut.

#### **2. Blue Economy**

Konsep *Blue Economy* berasal dari gagasan tentang pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Konsep *Blue Economy* atau ekonomi biru secara

khusus bermula dari buku "The Blue Economy" yang ditulis oleh Gunter Pauli pada tahun 2010. *Blue Economy* dikenalkan sebagai konsep ekonomi berkelanjutan yang didasarkan pada inspirasi dari alam, di mana limbah dari satu proses dapat menjadi sumber daya bagi proses lainnya, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Pauli, 2010). Gagasan ini berkembang dari pemikiran bahwa pemanfaatan sumber daya laut secara tradisional telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kekurangan sumber daya yang semakin parah. Konsep *Blue Economy* kemudian diadopsi oleh para ahli dan pembuat kebijakan sebagai alternatif dari pengembangan ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Konsep ini menekankan perlunya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, menghormati kelestarian ekosistem laut, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

*Blue Economy* juga telah menjadi kajian yang strategis dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi biru melibatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang merupakan sumber daya bersama yang melintasi batas negara dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan internasional. Ekonomi biru memiliki implikasi penting bagi tata kelola internasional. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut membutuhkan kerjasama antar negara, serta dengan organisasi internasional dan pemangku kepentingan serta kebijakan.

Dalam beberapa tahun

terakhir, *Blue Economy* telah menjadi sebuah disiplin yang berkembang pesat, dengan semakin banyaknya lembaga dan organisasi yang memperhatikan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada sumber daya laut. Tujuan utama dari konsep ekonomi biru ini adalah untuk mengembangkan model pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Sebagaimana menurut United Nations Development Programme (UNDP) bahwa *Blue Economy* merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesehatan ekosistem laut dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan lapangan kerja (UNDP, 2016). Ekonomi biru adalah konsep baru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan penciptaan lapangan kerja selaras dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut. Pauli (2010) berpendapat bahwa sumber daya laut yang terbarukan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang baru.. Sehingga tak hanya berfokus pada dimensi ekonomi saja, konsep *blue economy* juga mencakup dimensi sosial terutama berkaitan dengan peningkatan mata pencaharian dan upaya mengurangi kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya laut.

Sebagai konsep pembangunan

berkelanjutan, *Blue Economy* memiliki beberapa prinsip. Pertama, berusaha membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya laut dan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kedua, mempromosikan penggunaan sumber daya laut secara efisien untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Ketiga, berbasis pengetahuan tentang ekosistem laut dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Keempat, bersifat partisipatif melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kelima, mendorong integrasi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor lainnya, seperti pariwisata, energi, dan transportasi.

Ekonomi Biru berfokus pada penciptaan peluang ekonomi sekaligus melindungi lingkungan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir. Mencakup berbagai industri seperti perikanan, akuakultur, pariwisata, energi terbarukan, dan bioteknologi kelautan. Implementasi prinsip *Blue Economy* membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Manfaat potensial *Blue Economy* meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Namun, keberhasilannya bergantung pada pengelolaan sumber daya laut yang efektif, termasuk pencegahan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, penerapan *Blue Economy* atau ekonomi biru harus mengutamakan

keberlanjutan dan pemerataan akses sumber daya.

#### **A. Strategi Blue Economy**

Dalam pengimplementasian konsep *Blue Economy*, terdapat rencana atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Dengan adanya strategi ini, diharapkan *Blue Economy* dapat membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Strategi-strategi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **a. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

Pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah upaya untuk mengelola sumber daya ikan dan lingkungan perairan dengan cara yang memastikan mempertahankan hidup dan produktivitas sumber daya ikan untuk jangka panjang, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan memelihara hayati di dalamnya. Pengelolaan perikanan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi berbagai aspek, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial-ekonomi, serta mempertimbangkan perspektif jangka panjang dan keberlanjutan. Pengelolaan perikanan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti tingkat tangkapan yang dapat dipertahankan, laju pertumbuhan ikan, habitat ikan, dan keanekaragaman spesies.

Tujuan utama pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan, serta memastikan aktivitas perikanan tidak merusak lingkungan atau mengancam keberadaan spesies ikan.

Pengelolaan penangkapan melibatkan berbagai tindakan, seperti penyimpanan kuota penangkapan, pengaturan alat tangkap, pemberlakuan ukuran ikan minimum, peningkatan teknologi tangkap, dan upaya untuk membatasi pengambilan ikan oleh nelayan. Selain itu, pengelolaan perikanan berkelanjutan juga mencakup penelitian ilmiah, partisipasi nelayan aktif dan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan, serta penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pengaturan yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, diharapkan aktivitas perikanan dapat tetap berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat dan juga dapat memelihara keberlangsungan sumber daya ikan untuk masa depan.

b. Bioteknologi Kelautan

Bioteknologi kelautan memiliki potensi besar untuk mendukung dan meningkatkan konsep *Blue Economy*. Bioteknologi kelautan dapat digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, yang

Vol. 7. No. 1 (2024)

merupakan salah satu aspek penting dari *Blue Economy*. Dengan menggunakan bioteknologi, kita dapat mempercepat pengembangan teknologi untuk produksi makanan, obat-obatan, kosmetik, dan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penerapan bioteknologi dalam *Blue Economy* adalah penggunaannya untuk membantu menjaga keberlanjutan produksi perikanan. Dalam hal ini, bioteknologi dapat digunakan untuk pengembangan bibit ikan unggul, pengelolaan reproduksi ikan, dan pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, bioteknologi juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi dampak negatif polusi pada ekosistem laut.

Pengembangan produk-produk bioteknologi kelautan juga dapat memberikan nilai tambah pada ekonomi kelautan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam konsep *Blue Economy*. Dalam hal ini, bioteknologi kelautan dapat digunakan untuk menghasilkan produk-produk baru yang berasal dari sumber daya laut, seperti produk kosmetik dan obat-obatan.

c. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dilakukan secara ramah lingkungan, berkelanjutan secara ekonomi, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan

bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan melibatkan praktik-praktik yang bertanggung jawab, seperti penggunaan sumber daya yang efisien dan pengelolaan limbah yang baik, serta melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan pariwisata. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan dan budaya setempat.

Pariwisata berkelanjutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, seperti menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri lokal, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat lokal dapat merasakan manfaat jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan

Peningkatan kapasitas dan pendidikan dalam *Blue Economy* merujuk pada upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu dan kelompok dalam memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara

Vol. 7. No. 1 (2024)

berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan teknis, manajemen, dan sosial yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di sektor *Blue Economy*. Peningkatan kapasitas dan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pelatihan, pendidikan formal dan informal, pengembangan keterampilan, transfer teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.

Tujuan dari peningkatan kapasitas dan pendidikan dalam *Blue Economy* adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sumber daya laut dan pesisir, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan mereka serta lingkungan secara keseluruhan.

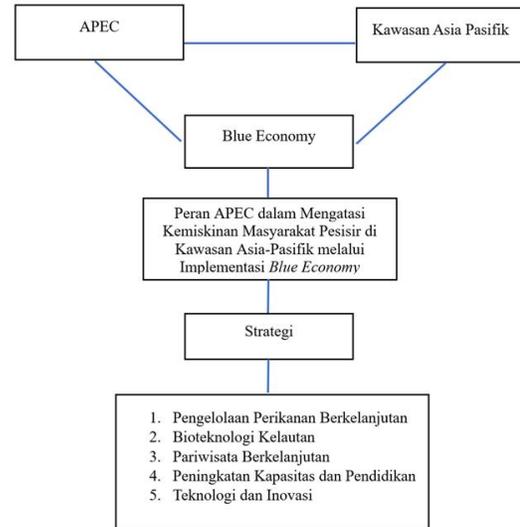
e. Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi dalam *Blue Economy* juga menjadi fokus internasional dalam rangka mencapai pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, "Teknologi dan inovasi akan memainkan peran penting dalam mencapai *Blue Economy* yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pesisir." Salah satu contoh penggunaan teknologi dan inovasi dalam *Blue Economy* adalah pengembangan teknologi pengawasan melalui sistem monitoring, control, and surveillance (MCS) untuk mencegah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Qu Dong Yu, "Teknologi dan inovasi adalah faktor kunci dalam melindungi sumber daya ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir."

Selain itu, teknologi dan inovasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan layanan di sektor *Blue Economy*, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) Inger Andersen, "Teknologi dan inovasi dapat membantu sektor *Blue Economy* untuk memperkuat keberlanjutan dan meningkatkan produktivitas, sambil menciptakan peluang ekonomi dan sosial yang berkelanjutan."

### 3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Riset

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena fenomena yang akan diamati adalah untuk memahami sebuah dampak sosial dari pelaksanaan suatu strategi atau kebijakan. Penelitian kualitatif diawali dengan asumsi dan penggunaan kerangka kerja yang bersifat interpretatif atau teoritis yang menginformasikan sebuah studi tentang masalah penelitian yang membahas individu atau kelompok yang dianggap berasal dari sebuah masalah sosial (Creswell, 2013) Maka penelitian kualitatif memungkinkan untuk melakukan studi mendalam tentang berbagai topik dalam istilah sederhana dan sehari-hari. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena objek penelitian ini, yaitu *blue economy*, membutuhkan data-data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari kebijakan, strategi, dan lain sebagainya. Selain itu, metode penelitian kualitatif yang menjelaskan mengenai sebuah masalah sosial sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang

peran dan cara APEC dalam mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik melalui penerapan atau kerangka konsep *blue economy*.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu salah satu model penelitian kualitatif yang diawali dengan rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data sampai menguji validitas data yang didapatkan. Selain itu, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk menjelaskan keadaan kontemporer yang diawali dengan kata tanya “bagaimana” atau “mengapa” untuk melihat lebih dalam mengenai sebuah fenomena sosial (Yin, 2018) sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan, yaitu “Bagaimana cara APEC mengatasi kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik dengan kerangka konsep *blue economy*?”.

## 2. Data, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, dan Instrumen Data

### A. Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data yang diperoleh berasal dari publikasi buku, jurnal artikel, laporan, berita, laman resmi APEC, dan lama institusi terkait. Data yang dikumpulkan merupakan yang terkait dengan topik penelitian yaitu “Peran APEC dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Kawasan Asia Pasifik melalui Implementasi *Blue Economy*”. Adapun data yang akan diambil oleh peneliti difokuskan pada tema sebagai berikut:

- a. Tema terkait kondisi masyarakat pesisir di kawasan Asia Pasifik, meliputi angka kemiskinan dan faktor yang

mempengaruhi munculnya kemiskinan di kawasan pesisir.

- b. Tema terkait penerapan konsep *Blue Economy* oleh APEC, yaitu strategi *Blue Economy* APEC.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu tahap krusial dalam penelitian ini, dimana data yang diperoleh akan menjadi dasar analisis dan pembuatan kesimpulan hasil penelitian. Menurut Moleong (2014), teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menghimpun data atau informasi yang berguna bagi penelitian, dilakukan baik dengan observasi, wawancara, kuesioner, tes, atau teknik lainnya. Dalam riset ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan informasi atau data melalui dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang dipakai berupa arsip, artikel jurnal, buku, berita, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Data yang diperoleh akan dijadikan sebagai bahan rujukan yang akurat dan valid, karena berasal dari sumber institusi.

### C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, seperti buku, jurnal artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan

konsep *Blue Economy* dan kemiskinan masyarakat pesisir di wilayah APEC. Dokumen tersebut diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah, lembaga penelitian, dan jurnal ilmiah. Sumber data sekunder juga diperoleh dari laman resmi APEC. Situs web ini menjadi sumber informasi yang penting untuk memperoleh data mengenai program-program APEC yang berkaitan dengan konsep *blue economy* dan kemiskinan masyarakat pesisir. Dalam memilih sumber data sekunder, peneliti mempertimbangkan keabsahan dan keandalan sumber data yang dipilih. Selain itu, peneliti juga memperhatikan relevansi sumber data dengan tujuan penelitian dan metode yang digunakan.

#### **D. Instrumen Data**

Instrumen utama dalam sebuah penelitian adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai instrumen yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Sebagai instrumen, peneliti harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Untuk membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini, terdapat instrumen pendukung lain yang menjadi peralatan penelitian, seperti gawai, komputer jinjing (*laptop*), dan internet. Selain itu, peneliti akan menggunakan data set penelitian untuk membantu proses penelitian menjadi terarah.

### **3. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk

*Vol. 7. No. 1 (2024)*

pada model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang dilakukan melalui empat tahap:

#### a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan seluruh perolehan data yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian, baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti menggunakan bantuan aplikasi maupun website yang dapat membantu untuk mengorganisir serta mencari data kualitatif yang relevan dengan penelitian saat ini seperti *Knowledge Maps*, dan *google scholar*.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dimana peneliti melakukan pemilihan dan penyortiran data yang terkumpul agar dihasilkan data yang relevan dan berguna untuk penelitian. Data yang dipilih merupakan data yang mengarah pada pemecahan masalah atau menjawab masalah penelitian. Tahap ini digunakan untuk mengklasifikasi serta mempertajam data yang diperlukan agar memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam mereduksi data, peneliti menggunakan bantuan aplikasi *Atas.ti* dan *vos viewer*.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data penelitian ini akan disajikan dalam bentuk naratif yang berjumlah enam bab. Narasi yang disajikan merupakan gabungan dari susunan informasi yang telah diklasifikasi sedemikian rupa agar memudahkan peneliti dan supervisor untuk melihat apakah kesimpulan sudah tepat atau masih diperlukan analisis ulang agar

maksud dan tujuan peneliti dapat lebih jelas.

**d. Penarikan Kesimpulan**

Sejak awal penelitian, setiap proses yang dilakukan oleh peneliti adalah guna menemukan kesimpulan atau makna dari setiap data yang terkumpul. Peneliti akan melakukan verifikasi data yang diperoleh sebagai langkah akhir penelitian. Dalam kesimpulan, Peneliti menampilkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam BAB I sesuai dengan bukti dan fakta yang ada.

No	Tema Data	Data Set	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
1.	Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kawasan Asia-Pasifik	- Data kemiskinan masyarakat pesisir wilayah Asia-Pasifik. - Faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir. - Kondisi manajemen laut kawasan pesisir Asia-Pasifik.	- Berita - Artikel Jurnal - APEC annual report	- Penelitian berbasis internet - Penelitian berbasis dokumen
2.	Penerapan Konsep <i>Blue Economy</i> oleh APEC	- Strategi <i>Blue Economy</i> APEC - Mekanisme <i>Blue Economy</i> di Asia-Pasifik	- Berita - Artikel Jurnal - APEC annual report - Kementerian luar negeri Indonesia - Kementerian Kelautan Indonesia	- Penelitian berbasis internet - Penelitian berbasis dokumen

Tabel 3.1 Skema Pengumpulan

**Data**

**A. Validitas dan Reliabilitas Data**

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria yang digunakan, yakni kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Saleh, 2017). Validitas data diperlukan guna mengukur keabsahan data yang ada. Pada tahap ini peneliti menggunakan konsep triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik memeriksa data kembali agar periset yakin terhadap makna yang diperoleh merupakan data yang terpercaya (Stake, 2010). Teknik triangulasi dilakukan melalui metode *cross check* berkala dan *review panels*.

Berkenaan dengan validitas, diperlukan pula analisis reliabilitas guna memastikan bahwa data yang telah terverifikasi kebenarannya juga relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Guna memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti membuat dataset penelitian sebagai berikut :

**4. Lokasi, Waktu dan Jadwal Penelitian**

**A. Lokasi Penelitian**

Lokasi pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor.

**B. Waktu dan Jadwal Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan Februari hingga Juni 2023. Jadwal penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan penelitian mulai dari persiapan, pengajuan judul, pengumpulan data, masa bimbingan, seminar usulan riset, penelitian, hingga presentasi penelitian disajikan dalam bentuk *bar chart* sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Persiapan Penelitian	■				
2	Pengajuan Judul		■			
3	Pengumpulan Data		■	■	■	■
4	Masa Bimbingan		■	■	■	■
5	Seminar Usulan Riset				■	■
6	Penelitian			■	■	■
7	Presentasi Penelitian				■	■

Tabel 3.2 Rentang Waktu Penelitian

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Sejarah Blue Economy di Asia Pasifik

Lautan merupakan salah satu komponen ekosistem internal dan bersifat esensial pada kehidupan manusia karena meliputi sekitar tiga perempat permukaan bumi. Jutaan atau bahkan lebih orang di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang masih bergantung dengan hasil lautan untuk keberlangsungan hidup mereka baik untuk penghidupan maupun makanan. Maka dengan itu, lautan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pekerjaan, dan ketahanan pangan. Disini lautan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ‘barang’ ekonomi melainkan lautan juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi dan juga perdagangan yang secara tidak langsung berkaitan dengan konservasi dan keberlanjutan. Konsep *Blue Economy* pertama kali diangkat pada Konferensi Rio sebagai dimensi baru yaitu dimensi laut dari ‘*green economy*’ yang lebih luas dan merangkum hubungan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Maka *blue economy* secara umum didefinisikan sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, serta mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Konsep ini telah didefinisikan

dalam berbagai cara oleh berbagai organisasi dan institusi di dunia. Salah satunya yang seringkali digunakan adalah pengertian dari World Bank yang menjelaskan bahwa *blue economy* merupakan sebuah strategi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, serta kesehatan ekosistem laut (Juneja, M., et. al., 2021). Ruang lingkup *blue economy* sendiri dicermati menjadi sebuah kerangka berpikir untuk pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk membantu pertumbuhan serta pembangunan ekonomi sambil berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut yang bersifat efisien dan berkelanjutan. Hal ini dianggap sebagai sebuah ekonomi makro yang merupakan gabungan antara pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan hijau (*green growth*). Namun, pada *blue economy* fokusnya adalah pada ekosistem laut, lautan dan sistem ekonomi wilayah pesisir. *Blue economy* memiliki fokus pada aspek-aspek seperti perdagangan maritim, infrastruktur energi, perikanan, pariwisata, penambangan laut dalam, dan keanekaragaman hayati.

The Asian Development Bank memiliki 49 negara anggota di kawasan Asia-Pasifik, dimana hampir setengah dari negara-negara tersebut menjadikan lautan sebagai salah satu bentuk dalam struktur ekonomi mereka. Banyak negara di kawasan Asia-Pasifik masuk ke dalam kategori kategori *developing asia* dari The Asian Development Bank seperti India, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan lain-lain. Kategorisasi ini digunakan untuk menggambarkan status sosial ekonomi negara-negara tersebut dan juga untuk melihat tantangan yang mereka hadapi. Sektor perekonomian yang berbasis laut memiliki kontribusi yang

besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia-Pasifik bahkan di beberapa negara, perekonomian berbasis kelautan ini menjadi tulang punggung ekonomi demi menjalankan fungsi sosial-ekonomi negaranya. Maka *blue economy* telah menjadi kerangka utama yang ditetapkan oleh negara-negara di Asia-Pasifik, walaupun dengan konsep maupun kategorisasi yang berbeda pada setiap negara. Di satu sisi hal ini menyoroti peningkatan kesadaran dan kebutuhan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk mengatasi masalah dan tantangan yang berbasis kelautan secara keseluruhan (holistik). Peran lautan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah agenda penting sebagai salah satu bentuk komitmen negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk menangani *sustainable development goals* dan komitmen iklim.

Dari semua benua yang ada di dunia, Asia-Pasifik mencakup sebagian besar garis pantai darat dan laut dunia. Kawasan Asia-Pasifik mencakup Asia, Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Osenia. Wilayahnya sendiri meliputi dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta beberapa lautan, dan badan air lainnya. Dengan memiliki berbagai wilayah laut yang penting baik secara ekonomis dan ekologis di dunia, kawasan Asia-Pasifik secara langsung maupun tidak langsung menyediakan berbagai layanan yang berkontribusi pada kelangsungan hidup manusia, kualitas hidup, mendukung masyarakat pesisir lokal serta ekonomi mereka. Cakupan *blue economy* berpengaruh besar di Asia-Pasifik sehingga berpengaruh secara signifikan khususnya pada ekonomi kelautan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Kontribusi utama dalam

*Vol. 7. No. 1 (2024)*

sektor *blue economy* di Asia-Pasifik berasal dari pelayaran dan pelabuhan, pariwisata bahari, energi di lepas pantai, dan perikanan laut dan akuakultur, namun hal ini bervariasi di berbagai negara.

## 2. Pelaksanaan Blue Economy oleh APEC

Penerapan kebijakan *blue economy* di kawasan APEC dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan secara signifikan di kawasan Asia-Pasifik melalui penganekaragaman bentuk aktivitas ekonomi yang memaksimalkan berbagai sumber daya laut. Proses tersebut akan berdampak pada pertambahan nilai produk, namun dengan tetap menjaga kondisi lingkungan melalui penggunaan teknologi inovatif ramah lingkungan. Pengimplementasian model *blue economy* tersebut juga bersinergi dengan pelaksanaan program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan).

Wujud konkret mengimplementasikan *blue economy* di negara-negara Asia-Pasifik dalam industri perikanan adalah melalui penggunaan teknologi tangkap ikan ramah lingkungan yang efektif dan efisien. Terdapat pula pengembangan instalasi pendingin bertenaga tekanan air laut, hingga penggunaan alat *fish finder* yang memanfaatkan jaringan satelit untuk menghemat rute pelayaran kapal penangkap ikan, pembudidayaan benih unggul melalui teknologi inovatif, pengembangan spesies-spesies ikan baru, pengelolaan sistem usaha terpadu, hingga manajemen daur ulang limbah untuk dapat dijadikan bahan baku industri lain. Lebih lanjut,

pengembangan usaha melalui model *blue economy* juga menjadi salah satu kegiatan yang diarahkan untuk menunjang perkembangan usaha industri kreatif untuk meningkatkan kinerja yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial. Model *blue economy* yang digunakan untuk mengembangkan bisnis dan investasi dalam industri perikanan menjadi salah satu komponen utama untuk mewujudkan sistem manajemen laut yang baik, yakni laut yang sehat dan lebih produktif yang kemudian akan meningkatkan pemasukan ekonomi dari sumber daya kelautan termasuk perikanan (*productive ocean*). Namun secara beriringan juga mencegah kerusakan dan menciptakan lingkungan laut yang sehat (*healthy ocean*). Melalui prinsip tersebut, para pelaku bisnis atau investor dapat menghasilkan produk yang bernilai lebih karena memanfaatkan setiap unsur bahan baku secara maksimal.

Negara dan kepulauan di kawasan Pasifik saat ini sangat bergantung terhadap penerapan model *blue economy*, karena kebijakan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap aspek perekonomian dan ekologis. Oleh demikian, 21 negara APEC sangat menekankan penerapan *blue economy* guna mewujudkan perekonomian maritim yang berkelanjutan. Langkah-langkah dilakukan melalui penjalinan kerjasama regional, bilateral maupun multilateral antar negara Asia-Pasifik. Antara lain seperti forum APEC Virtual Working Group on Marine Debris (VWGMD) yang berfokus pada pengelolaan sampah hasil industri perikanan, salah satunya melalui program daur ulang. Penerapan program yang dicanangkan oleh APEC VWGMD akan mendorong berbagai pihak,

baik pemerintah, masyarakat, maupun industri swasta untuk melakukan land waste management (APEC Ocean and Fisheries Group 2019, 40-45). Mengingat Asia-Pasifik sebagai kawasan *bread basket* pada sektor perikanan, model sistem ekonomi terbarukan *blue economy* melalui budidaya perikanan tentunya akan sangat mendukung proses pertumbuhan industri kelautan di Asia-Pasifik. Meski demikian, tantangan yang perlu dihadapi dari penerapan *blue economy* di kawasan Asia-Pasifik adalah masih banyaknya penggunaan alat penangkapan yang masih konvensional dan ilegal sehingga sulit bagi negara untuk mengontrol penangkapan, hal tersebut berimbas pada penurunan jumlah ikan karena rusaknya habitat ikan laut di wilayah tersebut. Meninjau realitas tersebut, APEC mencanangkan program penegakan hukum sebagai tindakan preventif untuk mencegah penangkapan ikan ilegal yang melebihi batas jumlah ikan yang dibudidayakan. Guna menangani hal tersebut APEC menempuh langkah secara “soft power” dan “hard power” dengan pengawasan secara hukum internasional (Pradana, 2021).

### **3. Strategi Blue Economy oleh APEC**

Pengimplementasian konsep *Blue Economy* oleh APEC dilakukan melalui strategi-strategi yang telah dibahas dalam APEC Ocean-Related Ministerial Meeting keempat atau disebut dengan AOMM4 pada 28 Agustus 2014. Pertemuan ini telah menghasilkan sebuah deklarasi yang yang disebut dengan Deklarasi Xiamen. Salah satu pokok poin penting dalam deklarasi ini adalah komitmen negara-negara anggota untuk melestarikan dan menjaga kelestarian laut agar dapat terus memenuhi

kebutuhan saat ini tanpa merusak kepentingan dari generasi yang akan datang, serta memperhatikan tantangan baik dari faktor alam maupun manusia (APEC, 2014).

Dari deklarasi ini kemudian terciptalah bidang-bidang atau area yang akan menjadi prioritas APEC dan anggotanya untuk menerapkan konsep *Blue Economy* melalui beberapa strategi dan aksi di kawasan Asia Pasifik. Strategi-strategi tersebut dapat diklasifikasikan kedalam lima kategori bidang, sebagai berikut.

#### **A. Peningkatan Perikanan Berkelanjutan**

APEC telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan laut secara berkelanjutan melalui konservasi keanekaragaman hayati pesisir dan laut baik secara domestik maupun regional (APEC, 2014). Dalam Deklarasi Xiamen, hal ini meliputi upaya untuk melindungi spesies yang terancam punah, pemulihan lahan basah pesisir, hutan bakau, rumput laut, dataran pasang surut, terumbu karang, dan habitat penting lainnya. Hal ini termasuk terkait dengan *restocking* ikan, serta kerjasama dalam konservasi ekosistem laut besar dan mendorong implementasi upaya regional yang berkontribusi untuk memenuhi tujuan dan target global untuk melestarikan wilayah pesisir dan laut, termasuk untuk melestarikan setidaknya 10% wilayah pesisir dan laut yang dikelola secara efektif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui tindakan nyata APEC membentuk sebuah satuan kelompok kerja khusus yang disebut dengan APEC's Oceans and Fisheries Working Group (OFWG).

#### Vol. 7. No. 1 (2024)

Misinya sendiri adalah untuk mendukung dan membantu misi APEC mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kemakmuran berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. OFWG bekerja untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan terbuka di wilayah Asia Pasifik dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya perikanan, akuakultur, dan ekosistem laut yang berkelanjutan (APEC, 2021).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik dan APEC adalah maraknya tindakan *illegal fishing* yang terjadi dalam waktu lama dan sudah membudaya dalam masyarakat pesisir. Oleh karena hal tersebut, OFWG juga diharapkan dapat mengambil tindakan lanjutan untuk mengakhiri *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. Tindakan ini dilakukan melalui pengimplementasian *Roadmap on Combating IUU Fishing* lebih lanjut. Dengan berakhirnya *IUU fishing* ini, diharapkan kawasan Asia Pasifik bisa memiliki stok ikan yang dikategorikan aman serta memastikan kompetisi stok yang adil bagi setiap negara, dan mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan.

#### **B. Pariwisata Berkelanjutan**

Menyadari perlunya penanganan terkait dengan keberlanjutan sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan maraknya kasus "*greenwashing*" di sektor pariwisata, pada tahun 2017 APEC telah berkomitmen untuk mengeksplorasi langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan

sektor yang berkelanjutan dan inklusif, salah satunya adalah sektor pariwisata. Diskusi awal mengenai hal ini terjadi pada pertemuan APEC dalam *High Level Policy Dialogue on Sustainable Tourism* di Ha Long pada juni 2014. The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) menyebutkan pentingnya standar dan sertifikasi untuk mengatasi “*greenwashing*” yang marak terjadi di industri pariwisata kawasan Asia Pasifik (Singh, 2019).

Mengingat kontribusi industri pariwisata yang signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja di kawasan Asia Pasifik, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari berinvestasi di industri yang lebih bersifat berkelanjutan. The APEC Tourism Working Group (TWG) telah melakukan misi penting untuk mendukung transformasi industri pariwisata menjadi industri yang lebih inklusif dan bersifat berkelanjutan. Pada tahun 2013, TWG merilis laporan tentang pembangunan berkelanjutan destinasi wisata yang menyajikan kerangka kerja keberlanjutan pariwisata dan membahas definisi yang relevan dan alat ukur penilaian keberlanjutan pariwisata yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengelola pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dalam Rencana Strategis Pariwisata APEC tahun 2015 hingga 2019, kelompok kerja ini berfokus pada empat prioritas, salah satunya mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dengan mendorong pariwisata yang bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, the APEC Guidelines for Tourism Stakeholders yang

*Vol. 7. No. 1 (2024)*

disambut baik pada Pertemuan Menteri Pariwisata pada tahun 2018, memaparkan serangkaian pedoman untuk meningkatkan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Singh, 2019).

### C. Bioteknologi

Dalam Pertemuan Menteri Transportasi APEC ke-11 yang dilaksanakan di Detroit pada tahun 2023 ini, APEC telah memperkuat komitmennya untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di sektor maritim dengan meluncurkan prakarsa kolaborasi hijau yang bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan menerapkan praktik dan teknologi maritim baru yang lebih bersih. Prakarsa ini bertujuan untuk mengatasi peran sektor maritim yang menjadi penyumbang sekitar 3% dari emisi gas global. Sektor maritim berada di persimpangan jalan yang mana secara global, ada dorongan bagi perusahaan pelabuhan dan maritim untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih, menciptakan koridor pelayaran hijau, dan mengatasi emisi sektor (APEC, 2023).

Inisiatif maritim hijau dirancang untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan dengan mengeksplorasi aplikasi praktis dari teknologi maritim baru untuk kapal, bahan bakar alternatif, elektrifikasi, pengisian bahan bakar, serta mengidentifikasi hambatan, peluang, dan kebijakan yang mendukung transisi iklim operator pelabuhan.

APEC merencanakan untuk melakukan *workshop* inisiatif maritim hijau pada Agustus 2023 dan akan memberikan gambaran

tentang desain dan pengoperasian pelabuhan serta menajajaki cara untuk membangun kolaborasi antar pelabuhan. *Workshop* selanjutnya akan dilaksanakan selama dua belas bulan kedepan serta akan berfokus menyorot pada teknologi rendah dan nol emisi serta pengembangan kerangka kerja untuk operator maritim ramah lingkungan.

#### **D. Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan**

Dalam upaya implementasi konsep *Blue Economy* sebagai sebuah konsep ekonomi yang berkelanjutan, APEC berupaya untuk selalu melakukan peningkatan dan pemberian edukasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi maritim berkelanjutan. Dalam Deklarasi Xiamen 2014, APEC berupaya untuk mendorong eksplorasi sarana yang memungkinkan unruk memfasilitasi mobilitas peneliti dan mahasiswa kelautan serta mendorong universitas dan perguruan tinggi terkait kelautan untuk terlibat dalam kerjasama bidang pendidikan APEC.

APEC selalu mendorong anggotanya untuk mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan bersama guna memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai data dan informasi, pengetahuan ilmiah, diseminasi teknologi, dan proyek peningkatan kapasitas berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Selain itu, APEC juga mendorong anggotanya untuk meningkatkan kesadaran publik

#### Vol. 7. No. 1 (2024)

tentang masalah yang berkaitan dengan laut, terutama di kalangan muda dan generasi mendatang, melalui metode seperti memasukkan pendidikan kelautan kedalam kurikulum sekolah dan melalui proposal ekonomi APEC mempromosikan keterlibatan publik secara langsung dalam hal-hal edukasi dan pariwisata kelautan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

#### **E. Teknologi dan Inovasi**

APEC mengakui bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting untuk memahami lautan dan penting untuk mendukung pendekatan berbasis ilmu pengetahuan untuk pengambilan keputusan serta manajemen adaptif (APEC, 2014). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan industri kelautan tradisional, menumbuhkan sektor-sektor baru, dan merangsang pertumbuhan yang inovatif.

APEC selalu berupaya untuk mendorong peningkatan kerja sama sains, teknologi, dan inovasi dalam teknologi kelautan yang ramah lingkungan, termasuk teknologi energi terbarukan laut. Hal ini dilakukan melalui koordinasi antara APEC Policy Partnership on Science Technology and Innovation (PPSTI) dengan APEC Energy Working Group (EWG). Mendorong anggota APEC untuk mengambil langkah-langkah guna mempersempit kesenjangan sains, teknologi, dan inovasi di antara anggotanya melalui *sharing* informasi dan data, diseminasi teknologi, proyek peningkatan kapasitas, berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati

bersama. Mengeksplorasi kemungkinan cara untuk memperkuat ECOTECH dalam kerja sama terkait laut APEC.

#### 4. Dampak Blue Economy terhadap Ekosistem di Asia Pasifik dan Pengaruh Blue Economy terhadap Masyarakat Pesisir Asia Pasifik

Pengimplementasian *blue economy* menghasilkan dampak yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat pesisir di kawasan Asia-Pasifik. Ruang lingkup ekonomi biru di Asia-Pasifik memiliki cakupan yang cukup luas karena sebagian besar negara-negara Asia-Pasifik memiliki andil yang signifikan dari ekonomi kelautan dalam Produk Domestik Brutonya (PDB). Pangsa ekonomi biru di masing-masing PDB negara cukup bervariasi, dimulai dari serendah 1% hingga setinggi 30% dan di beberapa negara kepulauan dapat mencapai 87%. Berdasarkan hasil pengamatan, kontribusi utama pemasukan maritim tersebut adalah berasal dari aktivitas pelayaran dan pelabuhan, perikanan laut, sumber daya energi lepas pantai dan wisata bahari dengan konsentrasi yang berbeda-beda dari setiap negara. Misalnya Vietnam, dari total perolehan ekonomi biru, sektor minyak dan gas lepas pantai memberikan kontribusi sebesar 41% yang kemudian diikuti oleh sektor wisata bahari, manufaktur, dan perikanan. Begitupun dengan Malaysia, yang sebagian besar perolehan ekonomi biru berasal dari pangsa energi lepas pantai, meliputi minyak bumi mentah dan produksi gas alam. Sedangkan di Kamboja, 50% ekonomi laut dihasilkan dari industri kapal dan pelabuhan yang kemudian

#### Vol. 7. No. 1 (2024)

diikuti oleh perikanan dan akuakultur sebesar 46% serta wisata bahari 3%. Lalu di India, kontribusi terbesar terhadap ekonomi biru berasal dari sektor jasa kelautan (30%), diikuti sektor pertambangan (27,3%), industri (21,3%) dan perikanan (21,1%). (Juneja, M., et al., 2021). Hal tersebut juga tentunya berbeda dari Australia yang sebagian besar pemasukan *blue economy* berasal dari wisata bahari (lebih dari 50%), diikuti dengan eksplorasi dan ekstraksi minyak dan gas lepas pantai (31%), perikanan laut dan akuakultur (9%), manufaktur (7%) dan transportasi laut (3%). Lalu bergeser sedikit ke negara tetangga Australia, yakni Selandia Baru yang hingga tahun 2015 kontribusi maksimal ekonomi birunya berasal dari energi laut lepas, namun kemudian beralih ke pelabuhan dan industri pengiriman. Pada 2017, pengiriman menghasilkan 37,3% ekonomi biru di Selandia Baru, diikuti oleh perikanan dan akuakultur (28,9%), mineral lepas pantai (26,7%), jasa kelautan (4,8%) dan kelautan pariwisata (2,2%). Di negara kepulauan Pasifik seperti Kepulauan Solomon, sektor jasa berkontribusi paling besar bagi perekonomian nasional yang meliputi wisata bahari dan transportasi, diikuti oleh sektor perikanan dan akuakultur, dan industri yang memberikan kontribusi paling kecil termasuk aktivitas pertambangan lepas pantai.. Namun di Timor Leste, minyak dan gas lepas pantai berkontribusi sekitar 76% terhadap total BE dan 66% dari total PDB, diikuti oleh kegiatan pemerintah terkait laut, pelayaran dan pelabuhan (4%), pariwisata (1%) dan Perikanan dan Budidaya (0,4%) (PEMSEA, 2018).

Meninjau realitas di atas, pemasukan domestik yang cukup signifikan dari program *blue economy* di berbagai sektor tentunya akan turut serta

mendorong kemajuan bagi kehidupan masyarakat pesisir, baik secara ekonomi maupun sosial. Sebagaimana prinsip-prinsip utama *blue economy* sendiri yakni untuk mengarahkan kebijakan kelautan dan perikanan yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan guna mewujudkan pembangunan yang merata melalui diversifikasi kegiatan ekonomi. Semakin beragam aktivitas ekonomi yang ada maka akan semakin banyak pula masyarakat yang dapat diberdayakan. Contohnya dapat kita lihat dari banyaknya tenaga kerja yang terserap dari sektor ekonomi biru sebagaimana pada tabel berikut.

Country	Year	Size of Blue Economy (in USD)	Share of Blue Economy in GDP	Year	Estimated Employment
India	2017	-	4.1%	2019	16 million*
Australia	2016	71.4 billion	4.3%	2016	0.4 million
Bangladesh	2015	6.19 trillion	3.2%	2015	7.35 million
Cambodia	2015	2.4 billion	16%	2018	3.2 million
China	2015	-	9.6%	2015	35.9 million
Vietnam	2015	28.94 million	18.8%	2015	3 million
Hong Kong SAR, China	2016	3.65 billion#	1.2%#	2016	85,720
Indonesia	2015	860 billion	14.85%	2012	5.3 million
Malaysia	2016	-	23%	2016	4 million
Myanmar	2018	-	3.5%*	2017	2.3 million*
New Zealand	2017	3.8 billion	1.4%	2013	0.1 million
Papua New Guinea	2014	197 million^	3% <sup>^</sup>	-	-
Sri Lanka	2017	-	1.3%*	2017	0.58 million
Thailand	2018	-	22.6% <sup>^</sup>	2016	2.95 million <sup>^</sup>
Timor Leste	2015	1.97 billion	87%	2015	16,077
Solomon Islands	2014	-	8.9% <sup>^</sup>	2016	36,952 <sup>^</sup>

Grafik 4.4.. Grafik GDP dari *blue economy* di negara-negara Asia-Pasifik dan jumlah tenaga kerja yang terserap (Sumber: Contextualising Blue Economy in Asia-Pacific Region, The Blue Economy Framework, Juneja., Mani., et. al, 17).

Adapun wujud dari pengaruh program *blue economy* terhadap masyarakat pesisir dapat kita lihat satunya dapat dari penetapan wilayah konservasi yang secara simultan akan memberikan perubahan positif pada perekonomian dan mampu menekan laju *destructive fishing*. Pemandangan bawah laut yang kemudian dimanfaatkan sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha *resort*, *scuba diving*, *snorkeling* oleh masyarakat pesisir. Pengimplementasian prinsip *blue economy* lainnya dapat kita lihat dari pendirian sistem usaha terpadu, seperti

sistem usaha longyam di Brebes, Indonesia yang mengkolaborasikan antara peternakan dan perikanan. Adapun prinsip-prinsip *blue economy* yang diterapkan yakni, *minimize waste*, *multiplier effect*, inklusi sosial, inovasi dan adaptif. *Multiplier effect* yang dihasilkan dari praktik usaha tersebut adalah melalui pengelolaan kotoran hasil ternak yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesuburan tanah melalui proses alami menyeimbangkan unsur hara organik yang terkandung dalam tanah. Proses tersebut kemudian akan berimbas pada terciptanya pertanian organik ramah lingkungan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, usaha terpadu longyam mengusung sistem daur ulang, dimana kotoran ayam dari hasil peternakan dimanfaatkan menjadi atraktan plankton pada usaha perikanan. Dengan demikian, melalui sistem usaha tersebut tercipta suatu ekosistem ramah lingkungan dengan menjadikan limbah kotoran ternak sebagai input pada usaha perikanan. Oleh demikian, pengembangan usaha dengan model ekonomi biru pada praktiknya akan menunjang pertumbuhan usaha atau industri kreatif dan meningkatkan kinerja bisnis yang lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun sosial, namun secara beriringan juga tetap menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan yang dimaksudkan adalah bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan laut namun juga tidak membutuhkan pengeluaran ekstra, namun justru menekan pembiayaan dengan cara menggunakan komoditas yang lebih efisien namun menghasilkan produk dan pendapatan yang lebih besar dan tanpa limbah.

Pembangunan kelautan dengan mengimplementasikan model *blue*

*economy* diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang membantu dunia dalam menangkal tantangan perubahan iklim, mengingat ekosistem laut kini semakin terdestruksi oleh dampak perubahan iklim. Prinsip yang terkandung dalam konsep *Blue economy* sejalan dengan upaya pengendalian ancaman pemanasan global, sehingga diharapkan dapat membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan upaya pengentasan kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Sebagai kawasan yang menjadi poros perekonomian dunia yang berorientasikan potensi maritim, Asia Pasifik masih menghadapi permasalahan kemiskinan masyarakat terutama masyarakat pesisirnya. Laporan dari UNDP menyebutkan bahwa angka kemiskinan masyarakat pesisir di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Fiji mencapai angka lebih dari 30%. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang sifatnya alami maupun karena manusia/masyarakatnya itu sendiri. Utamanya hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat pesisir yang kemudian mendorong terjadinya pemanfaatan laut yang bersifat merusak dan eksploitatif. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan dan lingkungan saling berhubungan dimana terlihat dalam interaksi masyarakat pesisir dengan ekosistem pesisir dan laut.

Konsep ekonomi yang bersifat lingkungan dan keberlanjutan seperti *Blue Economy* menjadi sebuah kunci jawaban dari persoalan kemiskinan dan lingkungan yang saling berhubungan tersebut. *Blue Economy* merupakan konsep ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, serta mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Pengimplementasian

konsep *Blue Economy* untuk mengatasi masalah kemiskinan ini tentunya harus didukung oleh *stakeholder* yang berada di berbagai tingkatan di kawasan Asia Pasifik. Salah satunya adalah di tingkat regional, yaitu melalui The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Penerapan kebijakan *blue economy* di kawasan APEC diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara signifikan melalui penganekaragaman bentuk kegiatan ekonomi dan pemaksimalan potensi kelautan sehingga dapat menambah nilai produk untuk kesejahteraan masyarakat, namun dengan tetap menjaga kondisi lingkungan dan mencegah kerusakan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Melalui Pertemuan Menteri Kelautan APEC yang keempat pada tahun 2014, lahirlah sebuah deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Xiamen. Salah satu poin utama dari deklarasi ini adalah komitmen negara-negara anggota APEC untuk melestarikan dan menjaga kelestarian laut agar dapat terus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak kepentingan dari generasi yang akan datang, serta memperhatikan tantangan baik dari faktor alam maupun manusia dengan kata lain, APEC mendorong negara anggotanya untuk senantiasa mengimplementasikan konsep *Blue Economy* untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan. Upaya pengimplementasian konsep *Blue Economy* oleh APEC ini dilakukan melalui strategi yang dapat diklasifikasikan dalam lima kategori bidang.

Pertama, peningkatan perikanan berkelanjutan. APEC telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan laut secara berkelanjutan melalui konservasi keanekaragaman hayati pesisir dan laut baik secara domestik maupun regional. APEC membentuk sebuah satuan kelompok kerja khusus yang disebut dengan APEC's Oceans and Fisheries Working

Group (OFWG). Misinya sendiri adalah untuk mendukung dan membantu misi APEC mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kemakmuran berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. OFWG bekerja untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan terbuka di wilayah Asia Pasifik dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya perikanan, akuakultur, dan ekosistem laut yang berkelanjutan.

Kedua, pariwisata berkelanjutan. APEC telah berkomitmen untuk mengeksplorasi langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan sektor yang berkelanjutan dan inklusif, salah satunya adalah sektor pariwisata. Diskusi awal mengenai hal ini terjadi pada pertemuan APEC dalam *High Level Policy Dialogue on Sustainable Tourism* di Ha Long pada juni 2014. Mengingat kontribusi industri pariwisata yang signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja di kawasan Asia Pasifik, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari berinvestasi di industri yang lebih bersifat berkelanjutan. The APEC *Tourism Working Group* (TWG) telah melakukan misi penting untuk mendukung transformasi industri pariwisata menjadi industri yang lebih inklusif dan bersifat berkelanjutan, salah satunya adalah merilis laporan tentang pembangunan berkelanjutan destinasi wisata.

Ketiga, bioteknologi kelautan. APEC telah memperkuat komitmennya untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di sektor maritim dengan meluncurkan prakarsa kolaborasi hijau yang bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan menerapkan praktik dan teknologi maritim baru yang lebih bersih melalui Pertemuan Menteri Transportasi APEC ke-11. Inisiatif maritim hijau dirancang untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan dengan mengeksplorasi aplikasi praktis dari teknologi maritim baru untuk kapal, bahan bakar alternatif, elektrifikasi, pengisian

Vol. 7. No. 1 (2024)

bahan bakar, serta mengidentifikasi hambatan, peluang, dan kebijakan yang mendukung transisi iklim operator pelabuhan

Kategori keempat dan kelima merupakan peningkatan kapasitas dan pendidikan serta teknologi dan inovasi. Dalam upaya implementasi konsep *Blue Economy* sebagai sebuah konsep ekonomi yang berkelanjutan, APEC berupaya untuk selalu melakukan peningkatan dan pemberian edukasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi maritim berkelanjutan. Dalam Deklarasi Xiamen 2014, APEC berupaya untuk mendorong eksplorasi sarana yang memungkinkan untuk memfasilitasi mobilitas peneliti dan mahasiswa kelautan serta mendorong universitas dan perguruan tinggi terkait kelautan untuk terlibat dalam kerjasama bidang pendidikan APEC. APEC selalu mendorong anggotanya untuk mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan bersama guna memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai data dan informasi, pengetahuan ilmiah, diseminasi teknologi, dan proyek peningkatan kapasitas berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Dorongan implementasi *Blue Economy* yang dilakukan oleh APEC melalui strategi-strategi di atas menghasilkan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat pesisir di kawasan Asia Pasifik. Dampak positif ini dihasilkan dari signifikansi ekonomi kelautan yang berbasis *Blue Economy* dalam PDB yang bernilai disekitar 1% hingga paling tinggi 87%. Dengan demikian, penelitian ini telah menjawab dan menjelaskan bahwasannya, APEC memiliki peran dan andil dalam menurunkan angka kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik melalui upaya dorongan pengimplementasian konsep *Blue Economy* kepada negara anggotanya

melalui strategi-strategi khusus yang bersifat kolaborasi dan komitmen bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 4(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570>
- Ananta, A., Bauer, A., & Thant, M. (2013). *The Environments of the Poor in Southeast Asia, East Asia and the Pacific*.
- APEC. (2014, August 28). *Xiamen Declaration* [Fourth APEC Ocean-Related Ministerial Meeting-AOMM4 Towards New Partnership through Ocean Cooperation in the Asia Pacific Region]. Xiamen, China.
- APEC. (2021, September). *Ocean and Fisheries / APEC*. Asia-Pacific Economic Cooperation. Retrieved May 29, 2023, from <https://www.apec.org/groups/som-steering-committee-on-economic-and-technical-cooperation/working-groups/ocean-and-fisheries>
- APEC. (2023, May 18). *APEC Launches Green Maritime Initiative to Foster Collaboration and Address Climate Change / APEC*. Asia-Pacific Economic Cooperation. Retrieved May 29, 2023, from <https://www.apec.org/press/news-releases/2023/apec-launches-green-maritime-initiatives-to-foster-collaboration-and-address-climate-change>
- APEC OFWG. (2017, August). *APEC Marine Sustainable Development Report*. SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation (SCE), Ocean and Fisheries Working Group (OFWG).
- Barkenbus, J. (n.d.). *East-West Center APEC and the Environment: Civil Society in an Age of Globalization*.
- Chen, I. J. (2022, March). A CRITICAL APPRAISAL OF INITIATIVES OF ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) FOR THE BLUE ECONOMY: DEADLOCKS AND ANY POSSIBLE WAY OUT? *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, 17(1), 85-113.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications Inc.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. *The Sage handbook of qualitative research* (4th ed., pp. 1–19). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hettne, B., & Soderbaum, F. (2000). Theorising the Rise of Regionness. *New Political Economy*, 5(3), 457–472. <https://doi.org/10.1080/713687778>
- Silooy, M. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN ABSOLUT MASYARAKAT PESISIR ( NELAYAN ) DI DESA SEILALE KECAMATAN NUSANIWE. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, XI(1).
- Singh, S. K. (2019, February). APEC Policy Support Unit POLICY BRIEF No. 26. In *Recognising Sustainability in Tourism*. APEC Secretariat, APEC Policy Support Unit.
- FAO *STATISTICS*. (n.d.). [www.fao.org/fishery/static/Yearbook/YB2019\\_USBcard/index.htm](http://www.fao.org/fishery/static/Yearbook/YB2019_USBcard/index.htm)
- Icsf. (n.d.). *The following is the input of ICSF to the Compilation Document of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)*.
- Juneja, M., De Souza, C., Giriyan, A. L., & Ganeshan, S. (2021). *Contextualizing*

- Blue Economy in Asia-Pacific Region Exploring Pathways for a Regional Cooperation Framework Policy Brief Contextualizing Blue Economy in Asia-Pacific Region-Exploring Pathways for a Regional Cooperation Framework.*
- Mansfield, E. D., & Reinhardt, E. (2003). Multilateral determinants of regionalism: The effects of GATT/WTO on the formation of preferential trading arrangements. *International organization*, 57(4), 829-862.
- Maas, S.H. (2022). Rakyat Miskin Ekstrem Pesisir Indonesia dan Asia Tenggara: Butuh Perbaikan Regulasi Skala Nasional. Media Jambi
- Meere, Frank., Lack, Mary., Asia Pacific Economic Cooperation (Organization), & Asia Pacific Economic Cooperation (Organization). Fisheries Working Group. (2008). *Assessment of impacts of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in the Asia-Pacific*. Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat.
- Nurfauzi, N., & Mansur, U. (2022). IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR DI MASA NEW NORMAL. *Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1).
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Paradigm Publications.
- Pradana, M. A. (2021). DAMPAK BLUE ECONOMY TERHADAP EKOSISTEM DI ASIA PASIFIK. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 5(2), 164–174.  
<https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.2542>
- Söderbaum, F., & Hettne, B. (1999). Towards Global Social Theory. *Journal of International Relations and Development*, 2(4), 358–368.
- <https://www.researchgate.net/publication/n/259744727>
- The Blue Economy*. (n.d.).
- United Nations Development Programme (2016). *The Blue Economy Handbook: A Guide to the Oceans and Coastal Resources of Asia-Pacific*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications (Design and Methods)* (Sixth). Sage Publications Inc.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (Second). The Guilford Press.